

**PERAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DALAM MENUNJANG DESENTRALISASI FISKAL  
DAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu)**

**Anastasia Sianturi, Sjamsiar Sjamsuddin, Tjahjanulin Domai**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: anastasia.sianturi22@gmail.com

**Abstract:** *Supporting Local Revenue in Fiscal Decentralization and Regional Development (The Study in The Departement of Revenue at Batu). In the framework of the implementation of regional autonomy in accordance with UU No.32 Tahun 2004 on local government. Local governments are required to be able to organize and manage his own household Sweeping based regulations and develop and increase revenue. This study aims to determine, describe and analyze the role of local revenues to support fiscal decentralization and regional development. By using this type of qualitative research method with a descriptive approach. The analytical method used is through an interactive method of Miles and Huberman. It can be concluded that the local revenue Batu City still has a low degree of fiscal decentralization, the high degree of dependence on the central government means that there is a low contribution to the financing of development in the Batu City, especially in the construction of road infrastructure, irrigation and network.*

**Keywords:** *revenue, fiscal decentralization, the degree of fiscal*

**Abstrak:** **Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu).** Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara luas dan menyeluruh berdasarkan peraturan yang berlaku dan mengembangkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. Dengan menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah melalui metode interaktif Miles dan Huberman. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah Kota Batu masih memiliki derajat desentralisasi fiskal yang rendah, tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat berarti menunjukkan adanya kontribusi yang rendah terhadap pembiayaan pembangunan pada pemerintah Kota Batu, khususnya dalam pembangunan infrastuktur jalan, irigasi dan jaringan.

**Kata kunci:** pendapatan asli daerah, desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal

---

### **Pendahuluan**

Pendapatan Asli Daerah merupakan aspek penting pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahannya. Urusan pemerintah yang dulunya sentralistis berubah menjadi pemerintah yang mengurangi ketergantungan pemerintah pusat. Hal ini didasari oleh semakin besar dan beragamnya kebutuhan dan persoalan masyarakat sehingga kebutuhan desentralisasi semakin diperlukan. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya. Menurut Halim & Mujib (2009, h.1) ada 4 jenis desentralisasi yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, desentralisasi fiskal

dan desentralisasi ekonomi. Dari keempat desentralisasi tersebut, desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari seluruh jenis desentralisasi. Desentralisasi fiskal menurut Prawirosetoto dalam Pujiati (2006, h.5) yaitu pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran. Adanya implementasi desentralisasi fiskal yang bertolak ukur dari Pendapatan Asli Daerah harus diupayakan secara optimal karena Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk membiayai pelayanan dan

pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Kota Batu sebagai daerah otonom yang merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Timur dengan realisasi pendapatan asli daerah terbesar ke-2 setelah Surabaya. Di Kota batu ini yang bertanggung jawab atas upaya peningkatan PAD yaitu Dinas Pendapatan. Dilihat dari perkembangan realisasi PAD tahun 2008-2012 tiap tahun meningkat walaupun pada tahun 2010 persentasenya menurun. Masalah yang dihadapi Dinas Pendapatan Kota Batu yaitu besarnya PAD yang tidak lebih besar dari dana perimbangan dari pusat. Ini membuat pemerintah Kota Batu menjadi kurang optimal dalam menjalani kemandirian fiskal daerahnya. Hal inilah yang membuat peneliti untuk menganalisis pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal. Seiring dengan peningkatan pendapatan asli daerah maka harus ditunjang juga dengan meningkatnya pembangunan daerah Kota Batu. Peneliti disini hanya fokus pada pembangunan infrastruktur yang antara lain jalan, irigasi dan jaringan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis merumuskan masalah bagaimanakah peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Manfaat penelitian sebagai sumbangan masukan dan pemikiran bagi Dinas Pendapatan Kota Batu dalam kinerjanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai: “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku” (Mamesah dalam Halim, 2001, h.19).

Sumber keuangan daerah adalah sumber yang dapat dijadikan sarana untuk pembiayaan kegiatan daerah dan masuk pada kas daerah. Dalam Undang-undang No 33 Tahun 2004 pasal 5 disebutkan bahwa Sumber Penerimaan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli Daerah dan Pembiayaan.
2. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah
  - b. Dana Perimbangan
  - c. Lain-lain Pendapatan
3. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
  - b. Penerimaan Pinjaman Daerah
  - c. Dana Cadangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suhadak & Trilaksono, 2007, h.122).

Pendapatan asli daerah bersumber dari:

- (a) Pajak daerah
- (b) Retribusi daerah
- (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

### 2. Desentralisasi Fiskal

Menurut Prawirosetoto dalam Pujiati (2006, h.5), desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods / public service*). Menurut Bird dalam Gedeona (2009, h.4) desentralisasi Fiskal adalah (1) pelepasan tanggungjawab yang berada dalam lingkungan Pemerintah Pusat ke instansi vertikal di daerah dan ke pemerintah daerah; (2) pendelegasian suatu situasi dimana daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah; (3) pelimpahan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan di daerah.

Menurut Reksodiprojo dalam Munir (2004, h.106) menjelaskan bahwa kemandirian fiskal daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan menggunakan ukuran apa yang

disebut derajat desentralisasi fiskal. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan daerah. Adapun rumus dari derajat desentralisasi fiskal adalah:

$$DDF = \frac{PAD}{TPD}$$

Keterangan: DDF: Derajat Desentralisasi Fiskal  
PAD: Pendapatan Asli Daerah  
TPD: Total Penerimaan Daerah

Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah, menurut hasil temuan Tim KKD FE-UGM dalam Munir (2004, h.169) menentukan tolak ukur kemandirian fiskal daerah dilihat dari rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan APBD sebagai berikut:

- a. Rasio PAD Terhadap APBD 0,00-10,00% (Sangat Kurang)
- b. Rasio PAD Terhadap APBD 10,01-20,00% (Kurang)
- c. Rasio PAD Terhadap APBD 20,01-30,00% (Sedang)
- d. Rasio PAD Terhadap APBD 30,01-40,00% (Cukup)
- e. Rasio PAD Terhadap APBD 40,01-50,00% (Baik)
- f. Rasio PAD Terhadap APBD diatas 50,00% (Sangat Baik)

Analisis yang digunakan diatas sesungguhnya memperlihatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri yang tercermin dalam tingkat kemandirian Fiskal Daerah dengan menggunakan analisis ratio yang membandingkan indikator atau elemen-elemen PAD pada total pendapatan daerahnya, yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai institusi yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam tingkat kemandirian fiskal akan tercermin kinerja keuangan daerah dan penilaian terhadap manajemen pendapatan asli daerah.

### 3. Pembangunan Daerah

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Siagian, 2000, h.4). Pembangunan daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro & Todaro dalam Kuncoro 2004, h.63) yaitu:

- a. Ketahanan (*sustenance*): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang,

pangan, papan, kesehatan dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.

- b. Harga diri (*self esteem*): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
- c. *Freedom from servitude*: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan

### 4. Hubungan PAD dengan Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi tersebut tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan otonomi sepenuhnya didalam implementasinya diperlukan dana yang memadai. Oleh karena itu, melalui Undang-undang No. 33 tahun 2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana dapat ditingkatkan. Sebagai daerah otonom, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang menjadi sumber PAD maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka desentralisasi itulah maka daerah-daerah diberi otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Karena makna substantif otonomi itu sebenarnya adalah pengakuan pentingnya kemandirian. Implikasi lain yang sangat penting dari pengurusan kewenangan tersebut adalah semakin meningkatnya kebutuhan daerah dan pembiayaan penyelenggaraan aktivitas pemerintah dan pembangunan juga akan semakin besar.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal Kota Batu (2) desentralisasi fiskal dalam menunjang pembangunan daerah Kota batu (3) faktor-faktor pendukung dan penghambat peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan Kota Batu.

Lokasi penelitian di Kota Batu dan situs penelitian pada Dinas Pendapatan Kota Batu. Sumber data diperoleh dari data primer dan data

sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Model Interaktif menurut Miles & Huberman yang diterjemahkan dalam Tjepjep (1992, h.20). Analisis model interaktif ini melalui 4 tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **Pembahasan**

### **1. Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Kota Batu**

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Suhadak & Trilaksono, 2007, h.122). Dari hasil realisasi PAD Kota Batu tahun 2008, sumber PAD yang paling besar yaitu dari hasil Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Retribusi Jasa Umum dan Penerimaan Jasa Giro (Lain-lain PAD yang sah). Sama seperti tahun 2008, tahun 2009, sumber PAD yang paling besar bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Retribusi Jasa Umum, Penerimaan Jasa Giro (Lain-lain PAD yang sah) namun terdapat peningkatan Retribusi Perizinan Tertentu pada tahun ini sehingga Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber PAD paling besar di tahun 2009. Pada tahun 2010, sumber terbesar PAD sama seperti tahun 2009.

Sumber PAD yang paling besar pada tahun 2011 sama seperti tahun sebelumnya namun terdapat peningkatan realisasi penerimaan Pajak Restoran sehingga Pajak Restoran pada tahun 2011 merupakan salah satu sumber PAD yang terbesar. Kemudian di tahun 2012 sumber terbesar PAD yaitu dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Perijinan Tertentu dan Penerimaan Jasa Giro.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Widya Lena, S.T selaku Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota Batu pada hari Rabu 26 Maret 2014 pukul 08.30 WIB yaitu "pendapatan asli daerah juga tiap tahunnya meningkat karena adanya sumber objek pajak/retribusi baru". Selain itu adanya sumber objek pajak/retribusi baru di ditahun 2008-2012 diantaranya Retribusi Izin Konstruksi pada tahun 2009, Pajak Air Tanah tahun 2010, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah pada tahun 2010, Retribusi Menara Telekomunikasi pada tahun 2012.

Menurut Munir (2004, h.168) kemandirian fiskal yaitu kemampuan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal

ini berarti bahwa tingkat kemandirian fiskal adalah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD yaitu yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan lain-lain PAD yang sah. Otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai otonomi keuangan dengan baik, hal ini berarti terdapat kemandirian fiskal pada suatu daerah.

Reksodiprojo dalam Munir (2004, h.106) menjelaskan bahwa kemandirian fiskal daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah.

Berdasarkan analisis dapat dilihat bahwa tingkat desentralisasi fiskal dari tahun 2008-2012 masih di bawah 10%. Hal ini dapat dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yaitu tahun 2008 = 4,56%, 2009 = 4,71%, 2010 = 4,32%, 2011 = 6,78 %, 2012 = 7,82%. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Derajat desentralisasi fiskal tahun 2008-2012 Kota Batu masih sangat kurang.

Analisis derajat desentralisasi fiskal ini mengandung arti bahwa Kota Batu mempunyai tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang tinggi. Sebab pengukuran derajat desentralisasi fiskal ini semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya semakin rendah rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin besar.

### **2. Desentralisasi Fiskal dalam Menunjang Pembangunan Daerah Kota Batu**

Pendapatan Asli Daerah Kota Batu merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat membantu daerah untuk melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Kota Batu. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan atau kinerja keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dilihat dari perhitungan derajat desentralisasi fiskal yaitu rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah, Kota Batu masih tergolong kategori sangat kurang dalam perhitungan desentralisasi fiskal. Hal ini terbukti yaitu pada tahun 2008-2012 derajat desentralisasi fiskal Kota Batu masih dibawah 10%. Pada tahun 2008 derajat desentralisasi

fiskal Kota Batu sebesar 4,56%, sedangkan pada tahun 2009 derajat desentralisasi fiskal naik menjadi 4,71%, lalu pada tahun 2010 derajat desentralisasi fiskal turun menjadi 4,32%, naik kembali pada tahun 2011 sehingga derajat desentralisasi fiskal Kota Batu menjadi 6,78%, kemudian di tahun selanjutnya derajat desentralisasi fiskal naik kembali menjadi 7,82%. Menurut hasil temuan Tim KKD FE-UGM dalam Munir (2004:169) menentukan tolak ukur kemandirian fiskal daerah dilihat dari rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan APBD hasil 0,00-10,00% tergolong dalam kategori sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal Kota Batu tahun 2008-2012 tergolong kategori sangat rendah, yaitu pemerintah belum mampu mandiri dalam pembiayaan urusan daerahnya.

Menurut Norton dalam Suhadak & Trilaksono (2007, h.153) desentralisasi fiskal pada dasarnya berkaitan dengan dua hal pokok, yakni kemandirian daerah memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan, sedangkan kemandirian fiskal memperoleh pendapatan guna membiayai pengeluaran itu. Kemampuan daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Kota Batu dengan kategori sangat kurang berarti Kota Batu belum dapat dikatakan mandiri dalam hal pembiayaan pembangunan. Dalam hal ini dapat juga dikatakan bahwa Kota Batu masih belum bisa menunjang pembangunan daerah dari sudut pandang derajat desentralisasi fiskal. Pembangunan daerah disini, penulis memilih pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan. Penulis mengambil kesimpulan bahwa Kota Batu dalam hal desentralisasi fiskal masih belum bisa menunjang pembangunan infrastuktur jalan, irigasi dan jaringan.

### **3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah Kota Batu**

#### **a. Faktor Pendukung**

##### **1) Adanya komunikasi kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan wajib pajak dan wajib retribusi**

Komunikasi kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sosialisasi ini merupakan usaha Dinas Pendapatan Kota Batu yang berguna untuk memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran

tarif pajak dan mengenai peraturan dan undang-undang mengenai pajak.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Bapak L Bayoe di Bagian Pembukuan dan Pengembangan Potensi Dinas Pendapatan yaitu program sosialisasi pajak dilakukan dengan mengundang wajib pajak di restoran atau hotel tempat sosialisasi dilakukan. Sosialisasi ini dilaksanakan berdasarkan standar dari direktorat jenderal pajak yang memiliki tahapan, pertama tahap analisa, kedua tahap pelaksanaan sosialisasi dan ketiga tahap evaluasi dari sosialisasi yang telah dilaksanakan.

##### **2) Adanya objek sumber pendapatan asli daerah**

Kondisi geografis yang memadai, membuat para investor banyak menanamkan modal di Kota Batu. Dengan berbagai wisata, baik alam maupun buatan membuat Kota Batu menjadi kota pariwisata yang banyak dikunjungi pariwisataawan. Banyaknya pariwisataawan yang datang, membuat hotel, villa dan losmen sebagai tempat penginapan, serta restoran, rumah makan dan café sebagai tempat tujuan wisata kuliner yang ada di Kota Batu. Tempat Hiburan, Hotel, Villa, Losmen, Restoran, Rumah Makan dan Café merupakan objek sumber pendapatan asli daerah melalui pajak.

#### **b. Faktor Penghambat**

##### **1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak dan wajib retribusi**

Berbagai usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk meningkatkan pajak tidak akan berhasil jika kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Begitu juga dengan Dinas Pendapatan Kota Batu yang telah memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak, namun kurangnya kesadaran masyarakat masih rendah untuk membayar pajak dan retribusi.

Kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan agar masyarakat mengetahui fungsi dan kegunaan pajak. Hal serupa dijelaskan oleh Soemitro (1988, h.78) kesadaran pajak masyarakat Indonesia masih rendah, perlu ditingkatkan melalui informasi yang intensif, supaya masyarakat mengerti fungsi dan kegunaan pajak dalam masyarakat dan manfaat bagi diri pribadi. Kurangnya kesadaran masyarakat akan wajib pajak ini juga diperparah dengan berbagai kasus penyelewengan pajak yang marak terjadi di media massa. Hal tersebut jelas merupakan pengaruh yang kuat sehingga membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak.

##### **2) Sistem informasi dan teknologi yang kurang memadai**

Sistem informasi sangat dibutuhkan setiap orang terutama untuk organisasi agar dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Setiap organisasi dapat memanfaatkan internet dan jaringan teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitasnya secara elektronis. Terdapat dua alasan utama mengapa terdapat perhatian yang besar terhadap sistem informasi, yaitu meningkatnya kompleksitas kegiatan organisasi tata kelola pemerintahan dan meningkatnya kemampuan komputer. Selanjutnya, dengan tersedianya informasi yang berkualitas, tentunya juga akan meningkatkan kemampuan kompetitif (*competitive advantage*) organisasi yang dikelolanya.

Dengan sistem informasi dan teknologi yang kurang memadai di Dinas Pendapatan Kota Batu akan memperlambat pekerjaan para aparatur dibandingkan dengan adanya sistem informasi yang memadai. Sesuai dengan wawancara dengan ibu Widya Lena sebagai Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota Batu yang menjelaskan bahwa kurangnya sistem informasi dan teknologi yang memadai seperti di Kota-kota maju lainnya yang telah menerapkan sistem online.

### 3) Kompetensi sumber daya aparatur yang kurang

Kompetensi sumber daya aparatur sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur. Sebuah organisasi dalam mewujudkan eksistensinya dalam rangka mencapai tujuan memerlukan perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Suatu organisasi, menurut Riva'i (2004, h.35) "tanpa didukung pegawai/karyawan yang sesuai baik segi kuantitatif, kualitatif, strategi dan operasionalnya, maka organisasi/perusahaan itu tidak akan mampu mempertahankan keberadaannya, mengembangkannya dan memajukan dimasa yang akan datang".

Sesuai dengan wawancara dengan ibu Widya Lena, Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota Batu yang menjelaskan bahwa kuantitas aparatur Dinas Pendapatan Kota Batu telah mencukupi namun kompetensi aparatur masih kurang. Tingkat kualitas aparatur yang tidak sama disebabkan tingkat pendidikan yang berbeda antar pegawai. Untuk meningkatkan kompetensi aparatur diharapkan adanya pelatihan atau training organisasi untuk

dapat mengembangkan potensi tiap-tiap aparatur dalam mengerjakan tugas dan fungsinya

### Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Diantara empat sumber pendapatan asli daerah tersebut, yang paling besar kontribusinya terhadap PAD Kota Batu adalah dari sektor pajak.

Tingkat desentralisasi fiskal Kota Batu masih tergolong sangat kurang, ini terbukti dengan adanya derajat desentralisasi fiskal yaitu mengukur tingkat desentralisasi fiskal dengan mengukur rasio antara pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Dari data yang ada, tingkat desentralisasi fiskal di Kota Batu masih di bawah 10%, ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Batu masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dalam kemandirian keuangan daerahnya.

Dilihat dari derajat desentralisasi fiskal Kota Batu tahun 2008-2012, rata-rata tingkat penerimaan PAD terhadap Total Penerimaan daerah sebesar 5,6%. Jumlah ini merupakan jumlah yang relatif masih sangat kurang, karena tingkat pencapaian kinerja keuangan daerah dari PAD terhadap Total Penerimaan Daerah yang rendah menunjukkan masih besarnya ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat berarti menunjukkan adanya kontribusi yang rendah terhadap pembiayaan pembangunan pada pemerintah Kota Batu, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan.

Faktor pendukung peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah yaitu (1) adanya komunikasi kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan wajib pajak dan wajib retribusi, (2) adanya objek sumber pendapatan asli daerah. Faktor penghambat peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah yaitu (1) kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak dan wajib retribusi, (2) sistem informasi dan teknologi yang kurang memadai (3) kompetensi sumber daya aparatur yang kurang.

---

### Daftar Pustaka

Pujiati, Amin. (1990) **Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era desentralisasi Fiskal**. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 61-70.

- Gedeona, Hendrikus T. (2009) **Desentralisasi Fiskal: Kajian Perbandingan Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal Di Indonesia dan Jepang**. Jurnal Ilmu Administrasi Volume VI No.2, 167-191
- Halim Abdul dan Ibnu Mujib. (2009) **Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah**. Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana UGM.
- Halim, Abdul. (2001) **Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta, Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004) **Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang**. Jakarta, Erlangga
- Munir, Dasril. (2004) **Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta, YPAPI.
- Riva'i, Veithzal. (2004) **Manajemen Sumberdaya Manusia untuk Perusahaan: dari teori ke praktek**. Jakarta, Radja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang. (1999) **Administrasi Pembangunan**. Jakarta, Bumi Aksara
- Soemitro, Rohmat. (1998) **Pajak Dan Pembangunan**. Bandung, Salemba Empat
- Suhadak dan Trilaksono. (2007) **Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi**. Malang, Bayumedia Publishing.